

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	1
PENGANTAR	2
BAB I. PENDAHULUAN.....	3
BAB II. MENGENAL GOWA; POTENSI DAN PERMASALAHANNYA.....	7
BAB III. VISI DAN MISI 5 TAHUN KE DEPAN	37
BAB IV. KEBIJAKAN DAN PROGRAM UTAMA	57
BAB V. PENUTUP	68

PENGANTAR

Bismillahir Rahmanir Rahim

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

“**HARAPAN BARU**” merupakan judul dari uraian Visi, Misi dan Program kami , Drs.H.Sjachrir Sjafruddin Daeng Jarung sebagai calon Bupati dan Ir.H.Anwar Usman sebagai calon Wakil Bupati dari Kabupaten Gowa pada “Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA)” periode 2015/2016.

Uraian Visi, Misi, dan Program ini adalah hasil analisa dan pemikiran kami setelah mempelajari potensi dan permasalahan di Kabupaten Gowa sekarang, kemudian apa yang kami uraikan disini adalah merupakan janji politik kepada masyarakat Gowa untuk kelak ditagih atau diingatkan bila ada yang tidak dilaksanakan atau menyimpang.

Memang banyak yang harus dilakukan, baik itu merupakan program lama dan telah dijalankan oleh Bupati sebelumnya dan sangat diperlukan oleh masyarakat, ataupun merupakan program nasional dari Pemerintah Pusat di Jakarta, tidak lagi diuraikan disini. Hanya hal-hal yang spesifik terkait dengan keinginan untuk mengetengahkan hal-hal baru, sehingga itulah kami memberi judul “**HARAPAN BARU**” dari uraian ini.

Tulisan ini disampaikan untuk menjadi bahan kajian, diskusi atau perdebatan yang diselenggarakan dalam rangka PILKADA. Kami mengakui bahwa tulisan ini masih banyak kekurangan, khususnya data pendukung yang hanya sampai pada tahun 2011-2012 padahal sekarang kita sudah berada pada semester II tahun 2015, tetapi paling tidak *issue* dan solusi yang kami ajukan disini dapat menjadi bahan kajian 5 tahun kedepan membangun Gowa.

Terima kasih dan wassalam,

Drs.H.Sjachrir Sjafruddin Daeng Jarung

Calon Bupati

Ir. H. Anwar Usman

Calon Wakil Bupati

BAB I

PENDAHULUAN

GOWA, memiliki sejarah panjang baik dari aspek politik yang mencakup pemerintahan dan wilayah kekuasaannya, maupun dari aspek budaya dan ekonominya.

Sejarah masa silam, sejak terbentuknya **Kerajaan Gowa**, menunjukkan kejayaan sebagai salah satu kerajaan terbesar di kawasan Nusantara bagian timur yang mempunyai kekuasaan dari gugusan pulau-pulau Nusa Tenggara meliputi Pulau Lombok, Sumbawa, Flores dan Timor di bagian selatan, ke bagian timur meliputi Pulau Buton, Ambon dan sekitarnya, sampai ke Marege (bagian utara Australia) dan bagian utara sampai ke Philipina Selatan dan ke barat sampai di Kutai. Sedangkan pengaruhnya mencakup wilayah yang lebih luas lagi, berkat keberanian dan keuletannya mengarungi samudera, para saudagarnya membawa dagangannya merambah masuk ke Pulau Jawa, Sumatera sampai ke Siam, Madagaskar dan Afrika. Setiap kawasan yang dimasukinya membawa perhatian dan pengaruh kepada masyarakat yang didatanginya, mereka bukan hanya sekedar berdagang, tetapi juga beradaptasi dengan pemerintahan dan masyarakat setempat, kawin mawin, mempertukarkan atau memperkenalkan budaya Makassar dan bahkan menjadi laskar dan ikut menempati struktur pemerintahan. Oleh sebab itu, kita tidak heran bila menjumpai perkampungan bernama "**Makassar**" ataupun pemakaian "kata" bahasa Makassar di wilayah yang dimasukinya.

Memang kata "Makassar" tidak bisa dipisahkan dengan "Gowa". Gowa adalah wilayah teritorial dimana berdiri Kerajaan Gowa dan Makassar adalah

suku bangsa yang berada di wilayah kerajaan Gowa dan pemberian nama kota Makassar diabadikan sebagai suatu tempat yang dikaitkan dengan cerita pertemuan orang-orang Gowa dengan seorang penyebar agama Islam yang berpakaian serba putih. Pada pertemuan pertamanya, orang-orang Gowa menyebutnya sebagai suatu makhluk halus yang menjelma sebagai manusia dan berteriak “Akkasaraki” dan dari situlah daerah ini disebut Makassar dan orang-orangnya juga disebut suku Makassar. Jadi Kota Makassar adalah suatu wilayah kecil Kerajaan Gowa yang menjadi pusat perekonomian dan peradaban. Tidak banyak suku bangsa yang memiliki tulisan atau huruf bahasanya (alphabet), suku bangsa Makassar memilikinya, diperkenalkan oleh Daeng Pamatte, orang pintarnya Kerajaan Gowa dari suku Makassar.

Puncak kejayaan Kerajaan Gowa tercapai pada abad XVI-XVIII. Kemudian mulai surut setelah Belanda mengakhiri perjuangan orang-orang Gowa. Belanda memenangkan peperangan yang melelahkan, menelan banyak korban dan dengan berbagai tipu daya. Sultan Hasanuddin, Raja Gowa yang memimpin perlawanan, digelar sebagai “ayam jantan dari timur” karena keberaniannya yang pantang menyerah dan tidak sudah dijajah, akhirnya memilih menyepi dan menyendiri di Lakiung tidak lama setelah “Perjanjian Bongaya” sampai mangkat diusia masih muda, 39 tahun.

Sekarang setelah bangsa Indonesia merdeka dan semua kerajaan dari Sabang sampai Marauke melebur dalam suatu bangsa dan pemerintahan **Indonesia**. Pemerintah Indonesia membentuk wilayah provinsi yang meliputi wilayah kabupaten dan seterusnya sampai wilayah desa. Orang-orang Gowa, suku Makassar mendiami beberapa wilayah Kota dan Kabupaten, sebagian lain

merantau ke berbagai pulau dan provinsi dan sebaliknya suku bangsa lain banyak yang berdomisili, dilahirkan dan melahirkan, terkodrat menjadi orang Gowa sekarang yang tetap memiliki semangat perjuangan untuk membangun wilayah Kabupaten Gowa ini, “**GOWA butta nipajjului** (Gowa milik kita bersama)”.

Semangat dan kesuksesan orang-orang Gowa dulu tetap terpateri pada setiap dada insan orang-orang Gowa sekarang untuk membangun Gowa menjadi wilayah unggulan dan bermartabat di Indonesia, setara dengan wilayah lainnya yang telah maju sebagai suatu “**HARAPAN BARU**”. Inilah judul yang kami pilih **atas visi, misi dan program utama** kami, Sjachrir Sjafruddin Daeng Jarung dan Anwar Usman, sebagai “**janji politik**” yang seharusnya disampaikan secara terbuka dan tertulis sebagai seorang calon Bupati dan Wakil Bupati untuk suatu saat dapat diingatkan dan ditagih pelaksanaannya oleh para pemilihnya atau masyarakat bila terpilih kelak atau memenangkan pilkada dan menjadi pemimpin di Kabupaten Gowa, Insyaallah.

Mengenai **Visi** yang diuraikan di sini tentu bersifat normatif sebagai cita-cita luhur dan **Misi** merupakan pokok-pokok cakupan yang diperjuangkan melalui **Program**, yang dijalankan bila kami memimpin kelak. Program yang telah berlaku nasional, seperti **Kartu Pintar** di bidang pendidikan dan **Kartu Sehat** ataupun Jaminan Kesehatan, yang tidak dibahas lagi disini dan bukan “*issue*” yang ditawarkan ke masyarakat karena sudah menjadi program yang harus dijalankan oleh pemerintah kabupaten di Indonesia. Demikian pula program yang sudah berjalan dari Bupati sebelumnya yang dianggap mendukung

pelaksanaan misi, tetap diteruskan dan tidak dibahas lagi. Yang dibahas adalah tentunya program baru atau revisi dari program lama.

Selain itu, yang sangat penting dikemukakan pada awal uraian ini bahwa data statistik dari beberapa gambaran Kabupaten Gowa sekarang hanya didasarkan pada data Tahun 2011-2012 karena hanya data itu yang kami bisa akses. Sesungguhnya untuk memberikan penilaian dan perencanaan yang baik adalah didasarkan pada data yang *“up to date”*, minimal 2 tahun sebelumnya, sehingga kami ingin menyampaikan maaf lebih awal bila sudah ada perubahan yang belum di *update*. Semoga data yang kami peroleh ini tidak jauh dari keadaan sekarang sehingga *issue* yang dibahas masih relevan dengan keadaan sekarang.

Mungkin banyak permasalahan dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Gowa yang tidak bisa dipenuhi, baik karena keterbatasan waktu (1 periode pemerintahan hanya 5 tahun, keterbatasan sumber keuangan baik yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), maupun Penghasilan Asli Daerah (PAD) serta keterbatasan Sumber Daya Manusianya (SDM). Namun dengan keterbatasan faktor-faktor tersebut di atas, kami mencoba mengidentifikasi permasalahan, mempelajari potensi atau sumber-sumber dana dan akhirnya menyusun *“program”* prioritas untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan orang banyak dan rakyat kecil yang sasaran akhirnya bermuara pada upaya peningkatan pendapatan masyarakat Gowa untuk mencapai kehidupan yang setara dengan masyarakat yang telah maju dan bermartabat, sehingga bangga menjadi bagian dari masyarakat Gowa.

BAB II

MENGENAL GOWA, POTENSI DAN PERMASALAHANNYA

2.1. LUAS WILAYAH DAN PENDUDUKNYA

Luas wilayah Kabupaten Gowa mencapai 1.883,33 km², di sebelah utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar, Jeneponto dan Bantaeng, sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bone dan Sinjai. Di sebelah baratnya sepanjang pantai termasuk wilayah Kota Makassar dan Kabupaten Takalar.

Ada wilayah pantai, tetapi tidak signifikan untuk membangun sarana dan akses dari dan ke laut karena hanya sepanjang tak lebih dari 2 kilometer di Kecamatan Bontonompo Selatan, dijepit oleh wilayah Kabupaten Takalar.

Propinsi Sulawesi Selatan menempati kaki dari Pulau Sulawesi berbentuk seperti **huruf U** sehingga Propinsi ini mempunyai pantai yang sangat panjang dari ujung Utara Barat, Kabupaten Pinrang berputar kembali ke ujung Utara Timur sampai ke Kabupaten Luwu Timur. Sedangkan bagian selatan dari propinsi ini menempati bagian bawah dari huruf U tersebut. Pada Gambar 1 di bawah ditunjukkan peta Kabupaten Gowa yang memperlihatkan posisi geografisnya yang berbatasan dengan Kabupaten lainnya yang berada di bagian selatan dari Propinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan Tabel 1 di atas dapat disimpulkan bahwa wilayah dataran tinggi yang luasnya mencapai 1.510,16 km² atau 80% tetapi jumlah penduduknya hanya mencapai 183.257 jiwa atau 28% dari total populasi 652.941 jiwa, sehingga kepadatan penduduknya hanya rata-rata 121 jiwa per 1 km². Sedangkan wilayah dataran rendah menunjukkan keadaan sebaliknya, luasnya hanya 373,17 km² atau 20% dari total luas wilayah tetapi didiami sebanyak 469.684 jiwa atau 72% dari total jumlah penduduk, sehingga kepadatan penduduknya mencapai 1.259 orang per 1 km².

Perincian jumlah kecamatan, jumlah penduduknya, luas wilayahnya pada dataran tinggi dan dataran rendah dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah.

Tabel 1
Wilayah Kecamatan, Luas, Jumlah Penduduk
dan Tingkat Kepadatan per wilayah

No. Urt	Nama Wilayah Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (km²)	Kepadatan Penduduk (jiwa/ km²)	Dataran Tinggi/ Rendah
01	Sombaopu	130.287	28,09	4.638	Rendah
02	Pallangga	98.721	48,25	2.046	Rendah
03	Barombong	34.527	20,67	1.670	Rendah
04	Bajeng	62.334	60.10	1.037	Rendah
05	Bajeng Barat	22.918	19,03	1.204	Rendah
06	Bontonompo	39.295	30.39	1.293	Rendah
07	Bontonompo Selatan	28.471	29.23	974	Rendah
08	Bontomarannu	31.250	52,60	594	Rendah
09	Pattallassang	21.881	84,81	258	Rendah

	Sub Total Dataran Rendah	469.684	373.17	1.259	
10	Parangloe	16.564	221.26	75	Tinggi
11	Tinggimoncong	22.138	142,94	155	Tinggi
12	Tombolopao	26.876	251,82	107	Tinggi
13	Parigi	13.089	132,76	99	Tinggi
14	Manuju	14.093	92,11	153	Tinggi
15	Biringbulu	32.347	218,84	148	Tinggi
16	Tompobulu	28.971	132,54	219	Tinggi
17	Bungaya	15.847	176,07	90	Tinggi
18	Botolempangan	13.332	141,82	94	Tinggi
	Sub Total Dataran Tinggi	183.257	1.510,16	121	
	Total	652.941	1.883,33	347	

Sumber: Kabupaten Gowa Dalam Angka, Th.2010 (dikoreksi)

2.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN WILAYAH

Untuk melihat potensi dan permasalahan di Kabupaten Gowa, kita melihatnya dari 2 sisi, **yang pertama** dari sisi letak geografisnya yang berbatasan dengan ibukota provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar. Pada sisi **yang kedua**, dari sisi topografinya yang mempunyai dataran tinggi dan dataran rendah.

Kota Makassar sebagai kota metropolitan dengan berbagai fasilitasnya yang tidak dimiliki oleh wilayah Kota atau Kabupaten lainnya di Sulawesi Selatan. Ruang wilayahnya yang sudah tidak sanggup menampung jumlah pertumbuhan penduduknya. Gowa tentu menjadi penyangga atas kebutuhan

area atau wilayah pemukiman akibat limbah penduduk Kota Makassar dan berbagai potensi dan permasalahan yang ditimbulkannya.

Dari sisi topografinya, potensi dan permasalahan adalah berbeda antara dataran tinggi dan dataran rendah. Dataran tinggi yang masih merupakan wilayah yang terbuka luas, penduduknya jarang, tetapi memiliki potensi pertanian dan perkebunan dan sumber pariwisata yang eksotik, memerlukan pembangunan infrastruktur, dan masyarakatnya sering menunjukkan kecemburuan untuk disamakan dengan fasilitas yang ada di dataran rendah. Orang-orang kota akan datang mencari tempat berlibur, membangun villa dan sekaligus berkebun, sedangkan orang-orang lokal akan membuka area perkebunan baru, investor mencari lahan pertanian yang lebih luas, eksplorasi dan eksploitasi pertambangan, yang bila pembangunan dan pengembangannya tidak ter-*manage* dengan baik maka akan menciptakan persoalan lain seperti wilayah Bogor yang menyuplai hasil sayurnya sekaligus tumpahan air hujannya ke Jakarta.

Sedangkan di dataran rendah, sebentar lagi, wilayah ini akan diserbu oleh masyarakat kota dan para pengusaha *real estate* yang bila tidak dipersiapkan dengan baik, tidak mustahil akan menjadi wilayah dengan berbagai persoalan sosial, ekonomi dan keamanan sebagai “pinggiran kota metropolitan”.

Potensi dan permasalahan tersebut di atas, kita kaji lebih terinci dalam uraian HARAPAN BARU ini.

2.2.1. LETAK GEORAFISNYA

Wilayah Kabupaten Gowa yang berbatasan dengan Kota Makassar, sehingga Kabupaten Gowa sebagai pintu gerbang dari bagian selatan Kota Makassar dengan berbagai fasilitasnya yang tidak dimiliki oleh wilayah Kota atau Kabupaten lainnya di Sulawesi Selatan. Dengan sendirinya wilayah Kabupaten Gowa juga sebagai penyangga atas pemenuhan kebutuhan ruang wilayah pemukiman akibat limpahan penduduk Kota Makassar dan berbagai potensi dan permasalahan yang ditimbulkannya sebagaimana diuraikan dibawah ini.

2.2.1.1. Wilayah Kabupaten Gowa merupakan wilayah lalu lintas antara Kota Makassar dengan 7 Kabupaten bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan.

Dengan melalui jalan darat yang menghubungkan Kota Makassar dengan 7 kabupaten bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan, yakni Gowa sendiri, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai dan Selayar harus melalui wilayah Kabupaten Gowa sebelum sampai di Makassar atau sebaliknya. Dari batas pintu gerbang bagian selatan yakni Kecamatan Bontonompo yang berbatasan dengan Kabupaten Takalar sepanjang sekitar 30 kilometer sampai pintu gerbang perbatasan dengan Kota Makassar merupakan lalu lintas kendaraan membutuhkan tempat persinggahan untuk beristirahat, berbelanja dan keperluan lainnya yang berpotensi untuk mendukung pengembangan pertokoan atau tempat perbelanjaan, restoran atau kuliner, stasiun BBM, hotel dan lain-lain.

2.2.1.2. Merupakan wilayah Penyanggah/penampung migrasi penduduk Kota Makassar.

Sebagai penyanggah Kota Makassar bermakna bahwa Gowa menjadi tempat penampungan para migrasi dari kota metropolitan ke daerah yang bisa menyediakan ruang pemukiman. Mereka memilih bermukim di Gowa di malam harinya dan bekerja di Makassar di siang harinya dengan jarak tempuh relatif pendek. Hal ini terjadi karena sempitnya wilayah Kota Makassar yang tidak sanggup menampung pertumbuhan penduduk baik akibat dari tingkat kelahiran maupun akibat migrasi dari luar Kota Makassar. Wilayahnya sangat terbatas dan tidak dapat lagi melakukan pemekaran terkecuali dengan reklamasi pantainya sehingga terpaksa mereka mencari tempat pemukiman alternatif dengan memasuki wilayah Kabupaten Gowa sebagai penyanggah untuk menampung mereka.

Perusahaan *real estate* berlomba mencari area pemukiman. Pada mulanya mereka memadati beberapa wilayah Kecamatan, mulai dari Somba Opu, Pallangga, Barombong, Bajeng, Bontomarannu dan Pattalassang di dataran rendah. Tidak mustahil di masa yang mendatang bisa merambah ke dataran tinggi di Kecamatan Bungaya, Manuju dan Parangloe.

Akibat dari semua yang diterangkan di atas menyebabkan peningkatan penduduk wilayah Gowa dari tahun ke tahun secara signifikan membawa berbagai konsekuensi masalah ekonomi, sosial, budaya dan keamanan kota ke Kabupaten Gowa sebagai penyanggah, baik yang bersifat positif, maupun yang negatif, diantaranya adalah meliputi :

1. Peningkatan jumlah penduduk yang berasal dari Kota Makassar diharapkan membawa dampak positif atas ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang diharapkan bisa menambah kemampuan untuk mensupply kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan di Kabupaten Gowa. Namun demikian, di lain hal dapat menjadi beban untuk penyediaan lapangan kerja atau menimbulkan peningkatan jumlah pengangguran.
2. Terjadi peningkatan harga tanah, namun akan menimbulkan banyak kasus perampasan/pendudukan lahan secara liar, pemalsuan surat-surat kepemilikan lahan dan lain-lainnya.
3. Kepadatan kendaraan menimbulkan kemacetan lalu lintas.
4. Meningkatnya kerawanan keamanan dan semakin banyaknya komplik sosial diantara warga seperti perkelahian, narkoba, premanisme dan asusila.
5. Terjadinya kesemrawutan pembangunan pemukiman dan pelanggaran lingkungan yang telah diatur sesuai Tata Ruang yang ditetapkan oleh Pemda dan terkesan kumuh karena munculnya pedagang “kaki lima” yang berjualan di bahu jalan atau di atas trotoar.
6. Meningkatnya pencemaran lingkungan, menyempitnya penyerapan air hujan dan penghijauan serta menambah pencemaran udara (polusi).
7. Terkikisnya luas areal pertanian dan perkebunan yang berubah fungsi menjadi pemukiman

2.2.1.3. Kota Makassar sebagai “pasar” dan sekaligus penyedia infrastruktur untuk ekspor bagi hasil-hasil produksi dari Kabupaten Gowa.

Penduduk Kota Makassar telah mencapai hampir 2.000.000 jiwa di siang hari dan mungkin sekitar 1.000.000 di malam hari, perbedaannya 1.000.000 terbagi sekitar 700.000 bermukim di wilayah Kabupaten Gowa dan sisanya di Kabupaten Maros (perbatasan utara dari Kota Makassar) merupakan jumlah konsumen yang cukup signifikan untuk menjadi pasar hasil-hasil produksi dari Kabupaten Gowa seperti :

- Buah-buahan dan sayur-mayur dari wilayah dataran tinggi.
- Beras, jagung, ketela dan makanan pokok lainnya baik dari dataran tinggi maupun dataran rendah.
- Ikan tambak, daging (ayam ternak, sapi dan lain-lainnya)
- Hasil produksi industri rakyat (*home industry*, seperti kerajinan tangan, bata merah dan lain-lainnya).
- Bahan baku industri dari hasil pertanian, seperti vanili, cengkeh, kakao dan lain-lain.
- Hasil produksi tambang dan galian seperti pasir, batu gunung, batu split, tanah untuk kebutuhan reklamasi pantai di Makassar dan lain-lainnya.

Selain pasar dari konsumen langsung, di Kota Makassar terdapat banyak pedagang besar, sebagai pengumpul untuk selanjutnya diekspor ke luar negeri atau penjualan antar pulau. Kota Makassar mempunyai sarana pergudangan, kontainer dan pelabuhan laut, sehingga hasil produk dari

Kabupaten Gowa bisa dikirim ke luar Sulawesi seperti sayur, daging ayam ternak ke Ambon, Papua dan Kalimantan dan Jawa.

2.2.1.4. Kota Makassar sebagai pintu gerbang Indonesia Bagian Timur

Sebagai pintu gerbang Indonesia bagian Timur, maka seluruh arus lalu lintas perdagangan, penerbangan, pelayaran, kedatangan turis manca negara dan lokal semuanya masuk ke Indonesia bagian Timur melalui Makassar.

Pemerintah, pengusaha ataupun produsen dari Kabupaten Gowa dapat memanfaatkan posisi strategis dari Kota Makassar sebagai pintu gerbang Indonesia bagian Timur. Mudah melakukan promosi hasil produknya untuk tujuan ekspor atau perdagangan antar pulau, mudah menawarkan ketersediaan lahannya untuk industri dan pariwisatanya kepada para turis, sehingga partisipasi pihak swasta untuk akselerasi pembangunan sangat memnungkinkan untuk digalang.

Sekarang ini hasil produksi sayur-mayur dan ayam ternak dari Kabupaten Gowa telah merambah ke Kalimantan Timur, Ambon dan Papua Barat, tinggal menunggu pengembangan variatifnya, volume dan kualitasnya untuk mendapatkan nilai ekonomis yang lebih baik.

2.2.2. KEADAAN TOPOGRAFISNYA

Sebagaimana telah diuraikan di muka bahwa wilayah Kabupaten Gowa terbagi 2 bila dilihat dari sisi topografinya yaitu dataran tinggi yang luasnya mencapai 1.510,16 KM² atau 80% dari total wilayahnya, sedangkan dataran rendah luasnya hanya 373,17 km² atau 20% dari total wilayahnya.

Perbedaan topografi ini menunjukkan perbedaan keadaan alam dan lingkungan membawa potensi dan permasalahan yang dibahas di bawah ini.

2.2.2.1. Dataran Tinggi

Beberapa gambaran keadaan alam dataran tinggi yang menunjukkan potensi dan permasalahannya sebagai berikut:

- a. Wilayah yang sangat luas, kepadatan penduduknya yang jarang menunjukkan masih tersedianya lahan pertanian baik untuk tanaman jangka pendek maupun jangka panjang (hortikultura) yang sangat potensial mengundang investor yang membutuhkan lahan yang luas untuk perkebunan atau pertanian yang ekonomis dengan skala yang besar selain dari hanyaperkebunan kecil-kecil yang tidak ekonomis karena tidak memberikan hasil optimal, menanam tanaman *hobby* bukan untuk komersil dan tidak mengikuti teknologi pertanian yang tepat.
- b. Letak perkampungan yang berjauhan, melalui jalan curam dan terjal sebagaimana umumnya di wilayah pegunungan dan perbukitan memiliki potensi namun juga menimbulkan permasalahan sebagai berikut:



Gambar 2
Puncak Gunung Bawakaraeng, pemandangan eksotik
di Wilayah dataran tinggi Kabupaten Gowa

- Udara sejuk, pemandangan alam gunung, sungai, air terjun, mata air dari gunung, hutan dengan keberagaman flora dan faunanya, dapat mengundang minat wisatawan, sehingga sangat positif dan potensial untuk bidang pariwisata yakni dengan mengelola beberapa objek wisata, termasuk agrowisata, taman rekreasi (*recreation park*) dan penyediaan fasilitas perhotelan. Disini juga bisa dibangun industri minuman kemasan.
- Luas wilayah, menempuh jarak transportasi yang jauh membutuhkan biaya investasi infra struktur yang mahal, jalan, jembatan, listrik, air minum.
- Oleh karena jarak transportasi yang jauh menyebabkan biaya transportasi yang mahal, sehingga harga atas kebutuhan

sehari-hari pada masyarakat dataran tinggi menjadi lebih mahal dibandingkan dengan di dataran rendah. Juga karena faktor transportasi yang sulit, maka banyak yang tidak bisa mengenyam pendidikan tinggi, putus sekolah, setelah pendidikan dasar tidak melanjutkan lagi ke jenjang yang lebih tinggi.

- Oleh karena hanya berbekal pendidikan dasar atau menengah pertama, maka SDMnya juga berkualitas rendah. Sulit mendapatkan job yang bisa berpenghasilan cukup. Selain dari hidup bertani atau berkebun, banyak yang terpaksa mengadu nasib sebagai tenaga kerja kasar di Malaysia dan negara-negara Timur Tengah atau migrasi ke Kalimantan untuk bekerja di perusahaan perkebunan besar.

2.2.2.1. Dataran Rendah

Beberapa gambaran keadaan alam dataran tinggi yang menunjukkan potensi dan permasalahannya sebagai berikut:

- a. Wilayah yang sangat terbatas, kepadatan penduduknya yang rata-rata telah mencapai 1.259 jiwa (tahun 2010) yang berada di atas luas wilayah 373.5 KM². Bahkan di Kecamatan Sombaopu, yang berbatasan dengan Kota Makassar sebagai ibukota Provinsi dan Kota Metropolitan sangat berpengaruh sehingga wilayah Kabupaten Gowa disini sudah berciri kota. Ada 7 (tujuh) hal yang diakibatkannya sebagaimana diuraikan di depan menuntut perhatian yang lebih banyak dari Pemerintah Daerah. Inilah yang biasa menimbulkan **“kecemburuan”** masyarakat yang tinggal

di dataran tinggi dan secara politik ingin memisahkan diri dengan membentuk kabupaten baru (pemekaran).

- b. Mata pencaharian penduduknya sudah mulai bergeser dari pertanian padi dan jenis palawija lainnya beralih ke perdagangan, perindustrian, karyawan negeri dan swasta. Lahan pertanian juga sudah semakin sempit. Memang masih ada tersisa di Kecamatan Bajeng, Bajeng Barat, Bontonompo dan Bontonompo Selatan, tetapi wilayah di Kecamatan lain di dataran rendah lambat laun tidak bisa bertahan dan pasti menjadi bagian pinggiran kota.
- c. Banyak bermunculan kompleks perumahan di sana-sini, sangat laku karena desakan konsumen yang sudah terdesak dari Kota Makassar, kamingnya, manajemen pengolahan purna jual atau pemeliharannya tidak berjalan baik. Sarana jalan, saluran air dan penghijauan tidak dikelola dengan baik, sehingga terkesan, jalan berlubang dan membebani pemerintah daerah untuk memeliharanya, kotor dan kumuh, kelas menengah ke bawah tidak memperoleh fasilitas yang layak, bahu jalan sampai trotoar dipenuhi oleh pedagang kaki lima yang semrawut yang pada gilirannya menyebabkan kemacetan lalu lintas poros Makassar ke 7 wilayah Kabupaten lainnya di bagian selatan dari Provinsi Sulawesi Selatan.
- d. Terdapat beberapa objek wisata, seperti Balla Lompoa, Makam Raja-Raja Gowa termasuk Makam Sultan Hasanuddin, Makam Syech Yusuf, Danau Mawang, dan Bili-Bili dan Muara Sungai Jeneberang yang belum dikelola dengan baik dan bahkan belum tereksplorasi.
- e. Terdapat tempat untuk penambangan pasir dan batu kali sepanjang Sungai Jeneberang dan di bahu sungai berpotensi untuk ditanami

pohon yang kategori pohon komersil (ada pembelinya dalam volume besar).

- f. Terdapat banyak sekolah dari tingkat dasar dan perguruan tinggi, bahkan beberapa kampus perguruan tinggi yang berkualitas dan populer seperti Institut Agama Islam Negeri Alauddin dan Fakultas Teknik Unhas berada di wilayah dataran rendah ini. Tetapi belum ada Rumah Sakit besar dan representatif, sehingga umumnya orang-orang Gowa masih ke Kota Makassar untuk mendapat pelayanan kesehatan yang baik.

2.3. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa perlu juga mendapat perhatian khusus karena sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah, bahkan sebagai penggerak utama roda pembangunan daerah.

Ada 2 (dua) sisi yang menentukan dalam APBD yakni **“pendapatan”** dan **“pembelanjaan”**. Meningkatnya jumlah pendapatan semakin memperluas kemungkinan untuk melakukan pembelanjaan yang bisa meningkatkan akselerasi pembangunan. Sedangkan jenis pembelanjaan memperlihatkan kearah mana pembangunan dijalankan oleh Pemerintah Daerah.

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa pada Tahun Anggaran 2015 diharapkan pendapatannya adalah sebesar Rp. 1.339.477.079.210 yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya

sebesar Rp.131.694.496.577 atau hanya 9,8 atau dibulatkan 10%. Berarti sisanya 90% berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Adapun penggunaannya atau anggaran belanjanya berupa “Belanja Langsung” atau barang modal atau investasi sebesar Rp.515.011.628.372,13 dan “Belanja Tidak Langsung” atau biaya rutin sebesar Rp.863.773.894.625,87. Berarti alokasi ke biaya rutin menyerap kurang lebih 62% dan investasi hanya sebesar 38%.

2.4. TINGKAT PENDAPATAN PERKAPITA

Tingkat pendapatan perkapita atau tingkat pendapatan per kepala/jiwa dari penduduk apakah secara nasional atau daerah menunjukkan sampai dimana tingkat kemakmuran penduduknya. Semakin tinggi pendapatan perkapita dianggap semakin makmur penduduknya.

Tingkat pendapatan perkapita dihitung dari seluruh penghasilan negara atau daerah dibagi dengan jumlah penduduknya. Untuk menghitung tingkat pendapatan perkapita kabupaten biasanya digunakan terminologi “**Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)**” yang dibagi dengan jumlah penduduknya sehingga menghasilkan “**PDRB per kapita**”.

PDRB diambil dari hasil seluruh sektor produksi dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah (domestik) yang berasal dari seluruh sektor yang meliputi sektor pertanian, perikanan, perdagangan, pariwisata, perindustrian, pertambangan, perdagangan lain-lainnya yang dinilai dengan uang (harga) sebagai suatu “*value*”. Perkembangan jumlah PDRB dari tahun ke

tahun menunjukkan pertumbuhan PDRB yang bisa dijadikan ukuran pertumbuhan ekonomi daerah (*economical growth*).

Untuk melengkapi gambaran kita tentang pendapatan per kapita, ada baiknya kita melihat perbandingan, mulai dari tingkat dunia, seluruh provinsi di Indonesia dan terakhir tingkat seluruh kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Kita ingin melihat dimana posisi pendapatan per kapita Kabupaten Gowa.

2.4.1. Pendapatan per kapita tingkat dunia

Bank Dunia menetapkan klasifikasi pendapatan per kapita yang diterbitkan pada bulan Juli 2012 berdasarkan data tahun 2011 yang dimuat pada jaringan internet “Global data” dan “Wikipedia” bahwa ada 4 (empat) klasifikasi pendapatan perkapita dari seluruh Negara di dunia ini, yakni:

- **Low Income, yang berpenghasilan <\$.1,025**
- **Lower Middle Income, yang berpenghasilan antara \$.1,026 - \$.4,035**
- **Upper Middle Income, yang berpenghasilan antara \$.4,036 - \$.12,475**
- **High Income, yang berpenghasilan >\$.12,476**

Tiga negara tetangga Indonesia dalam keluarga ASEAN mencapai pendapatan per kapita yang tergolong “**High Income**”, yakni Singapore (ranking 4), Brunei (ranking 5) dan Malaysia (ranking 47), sedangkan Indonesia berada pada golongan *Upper Middle Income* bersama Philippine dan Vietnam.

Bila dibandingkan dengan ranking 1, Qatar yang berpendapatan rata-rata \$ 136,727, Indonesia berpendapatan \$ 9,561 per jiwa, maka ketinggalan 14,3 kali, tetapi Indonesia sudah jauh meninggalkan Bangladesh (dengan pendapatan \$ 2,948, ranking 148), Papua New Guinea (dengan pendapatan \$ 2,539, ranking 152) dan Timor Leste (dengan pendapatan \$ 2,076, ranking 157).

Pada Tabel berikut disajikan nilai pendapatan setiap negara (hanya ditampilkan negara-negara tertentu untuk nanti dibandingkan dengan Indonesia, Sulawesi Selatan dan Gowa dan urutan rankingnya pada tingkat dunia.

Tabel 2
Pendapatan PerKapita Negara-Negara di Dunia

Nama Negara	Jumlah Income per kapita (USA \$)	Ranking dunia	Keterangan
Qatar	136,727	1	High Income
Singapore	78,763	4	High Income
Brunei	71,777	5	High Income
Saudi Arabia	53,644	9	High Income
USA	53,042	10	High Income
Germany	44,469	16	High Income
Japan	36,449	26	High Income
Malaysia	23,338	47	High Income
Turkey	19,020	59	High Income
Brasil	15,037	74	High Income

Thailand	14,394	76	High Income
South Africa	12,507	82	High Income
China	11,907	85	Upper Middle Inc.
Egypt	11,089	92	Upper Middle Inc.
Indonesia	9,561	100	Upper Middle Inc.
Ukraine	8,790	105	Upper Middle Inc.
Philippines	6,536	118	Upper Middle Inc.
India	5,412	124	Upper Middle Inc.
Vietnam	5,294	126	Upper Middle Inc.
Pakistan	4,602	132	Upper Middle Inc.
Ghana	3,992	134	Lower Middle Inc.
Sudan	3,373	140	Lower Middle Inc.
Bangladesh	2,948	148	Lower Middle Inc.
Papua New Guinea	2,539	152	Lower Middle Inc.
Timor Leste	2,076	157	Lower Middle Inc.
Afganistan	1,946	160	Lower Middle Inc.
Ethiopia	1,380	176	Lower Middle Inc.
Niger	916	180	Low Income
Burundi	772	184	Low Income
Central Africa Rep.	604	185	Low Income

Sumber data: World Bank, via Wikipedia Internet (modified),2013.

2.4.2. Pendapatan per kapita tingkat provinsi di Indonesia

Data pendapatan per kapita tingkat provinsi di Indonesia diperoleh dari tulisan **Vincent Gaspersz**, yang diterbitkan pada tahun 2014 atas analisisnya tentang Pendapatan dan Kependudukan di Indonesia yang menggunakan

data dari BPS tahun 2012, jadi 1 tahun lebih maju dari data pada Tabel 2 di atas yang menggunakan tahun 2011 sebagaimana diuraikan pada Tabel 3 di bawah.

Tabel 3
Pendapatan Per Kapita Per Propinsi di Indonesia

No.	Nama Provinsi	Pendapatan Per Kapita (Rp.)	Pendapatan Per Kapita (\$)	Ranking
1	Kaliman Timur	117.952.472	12.416	1
2	DKI Jakarta	114.879.524	12.093	2
3	Riau	84.695.182	8.915	3
4	Kepulauan Riau	54.620.665	5.750	4
5	Papua	27.446.009	2.889	8
6	Aceh	21.395.689	2.252	16
7	Sumatera Utara	27.046.101	2.847	9
8	Sumatera Barat	22.716.333	2.391	13
9	Jambi	23.495.399	2.473	12
10	Sumatera Selatan	27.693.972	2.915	7
11	Bengkulu	14.090.788	1.483	27
12	Lampung	19.000.172	2.000	22
13	Kepulauan Bangka Belitung	28.059.439	2.954	6
14	Jawa Barat	21.992.542	2.315	14
15	Jawa Tengah	17.184.507	1.809	23
16	DI Yogyakarta	16.495.777	1.736	25

17	Jawa Timur	26.729.127	2.813	10
18	Banten	20.020.098	2.107	19
19	Bali	21.573.951	2.271	15
20	Nusa Tenggara Barat	11.005.926	1.159	29
21	Kalimantan Barat	17.067.172	1.797	24
22	Kalimantan Tengah	25.259.382	2.659	11
23	Kalimantan Selatan	20.934.943	2.204	17
24	Sulawesi Utara	20.786.613	2.188	18
25	Sulawesi Tengah	19.378.302	2.040	21
26	Sulawesi Selatan	19.842.121	2.089	20
27	Sulawesi Tenggara	16.371.994	1.723	26
28	Gorontalo	9.967.659	1.309	30
29	Sulawesi Barat	12.435.151	1.309	28
30	Maluku	7.478.940	787	31
31	Nusa Tenggara Timur	6.727.580	708	32
32	Maluku Utara	6.664.181	701	33

Sumber: Vincent Gaspersz, diterbitkan 2014, berdasarkan data BPS Th.2011

Kalimantan Timur menduduki **ranking 1** dengan pendapatan per kapita sebesar **Rp.117.952.472**, ranking 2 adalah DKI Jakarta yang pendapatan per kapitanya Rp.114.879.524 dan ranking 3 adalah Riau dengan pendapatan per kapitanya sebesar Rp. 84.695.182. Sedangkan 3 provinsi ranking terbawah yakni ranking 31 adalah Maluku dengan pendapatan per kapitanya sebesar Rp.7.478.940, ranking 32 adalah Nusa Tenggara Timur pendapatan per

kapitanya sebesar Rp.6.727.580 dan yang terendah atau ranking 33 adalah Maluku Utara yang pendapatan per kapitanya hanya Rp.6.664.181.

Sulawesi Selatan menempati **ranking 20** dengan pendapatan per kapita **Rp.19.842.121**, selisih tipis dengan Sulawesi Tengah yang menempati ranking 21 dengan pendapatan per kapita Rp. 19.378.302, sedangkan yang tertinggi di antara 6 (enam) provinsi di pulau Sulawesi adalah **Sulawesi Utara** dengan jumlah pendapatan per kapitanya **Rp. 20.786.613**, menduduki **ranking 18**.

Selanjutnya, bila kita mengkonversi Rupiah kedalam USA Dollar dengan kurs Rp.1 sama dengan Rp.9.500 (rata-rata selama tahun 2011), maka hanya 4 provinsi yang masuk “Upper Middle Income”, yakni Kalimantan Timur, DKI Jakarta, Riau dan Kepulauan Riau. Hanya 2 provinsi yang masuk kategori “Low Income” yakni Maluku, Tenggara Timur dan Maluku Utara. **Provinsi lainnya, termasuk Sulawesi Selatan tergolong “Low Middle Income”**.

2.4.3. Pendapatan per kapita tingkat Kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan

Tabel 4 di bawah ini menunjukkan jumlah pendapatan per kapita seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan, sekaligus menunjukkan rankingnya masing-masing.

Tabel 4.
Pendapatan PerKapita seluruh Kabupaten
se Provinsi Sulawesi Selatan, periode Tahun 2011

No.Urt	Nama Kabupaten	Pendapatan Per Kapita (Rupiah)	Pendapatan Per Kapita (\$)	Ranking
1	Luwu Timur	39.387.454	4.146	1
2	Kota Makassar	32.118.182	3.380	2
3	Pangkajene Kepulauan	20.766.938	2.185	3
4	Pinrang	17.529.224	1.845	4
5	Wajo	17.111.133	1.801	5
6	Pare-pare	15.881.651	1.671	6
7	Sidenreng Rappang	15.350.303	1.616	7
8	Kota Palopo	15.291.036	1.610	8
9	Soppeng	14.195.790	1.494	9
10	Sinjai	13.994.793	1.473	10
11	Luwu	12.956.485	1.364	11
12	Luwu Utara	12.298.014	1.295	12
13	Bantaeng	12.209.399	1.285	13
14	Bone	12.188.533	1.283	14
15	Enrekang	11.925.764	1.255	15
16	Barru	11.358.620	1.196	16
17	Selayar	11.242.919	1.183	17
18	Bulukumba	10.755.395	1.132	18
19	Maros	9.432.271	993	19

20	Gowa	8.993.574	947	20
21	Takalar	8.696.171	913	21
22	Toraja Utara	8.319.159	875	22
23	Tana Toraja	8.053.762	848	23
24	Jeneponto	7.730.819	814	24

Dari Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa pemegang ranking 1 adalah Kabupaten Luwu Timur. Hanya kabupaten ini yang masuk pada kategori **“Upper Middle Income”** menurut kategori Bank Dunia. Mulai dari ranking 2 ditempati oleh Kota Makassar sampai ranking 18 yang ditempati Bulukumba 1t1u sebanyak 17 kabupaten masuk kategori **“Lower Middle Income”**.

Kabupaten Gowa pada ranking 20, bersama Maros, Takalar, Toraja Utara, Tana Toraja, dan Jeneponto tergolong “Lower Income”, meskipun masih sekelas dengan 3 provinsi terbawah di Indonesia yaitu Maluku, Nusa Tenggara Timur dan Maluku Utara.

Untuk setara dengan Kabupaten Luwu Timur sebagai ranking top di Sulawesi Selatan kita harus menggenjot 4 (empat) kali dan untuk menyamai tetangga terdekat Kota Makassar kita harus berusaha 3 (tiga) kali lipat. Gowa hanya unggul tipis dari Kabupaten Jeneponto dan Toraja yang berada pada papan bawah, tetapi bahkan kalah tipis dari Kabupaten Maros tetangga kita di bagian utara.

2.4.4. Pendapatan per kapita dan penduduk miskin Kabupaten Gowa

Statistik Pendapatan Per Kapita Kabupaten Gowa dari tahun 2005 ke 2012 ditampilkan pada Tabel 5 berikut ini dengan memperlihatkan dasar perhitungan harga yang konstan dibandingkan dengan harga yang berlaku dari tahun ke tahun. Statistik penduduk miskin juga perlu diuraikan disini karena termasuk salah satu ukuran keberhasilan pembangunan apabila jumlah orang miskin semakin menurun dari tahun ke tahun.

Dari tahun 2005 ke 2011, rata-rata peningkatan pendapatan per kapita dengan harga konstan, berarti mengabaikan faktor kenaikan harga setiap tahunnya adalah pada tingkat 4,3%, sedangkan apabila menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahunnya 21,8% tetapi harus dikurangi tingkat inflasi (kenaikan harga karena inflasi) untuk mendapatkan kenaikan pendapatan yang riil, bila kita asumsi rata-rata tingkat inflasi setiap tahun 10 %,maka berarti kenaikan pendapatan perkapita 11,8% setiap tahunnya.

Mengenai jumlah penduduk miskin dari tahun 2005 ke 2011 menunjukkan kenaikan rata-rata 8.6% dan prosentasi jumlah orang miskin terhadap total penduduk pada tahun 2010 sebanyak 652.941, tahun 2011 sebanyak 659.513 dan tahun 2011 sebanyak 670.465 jiwa,maka prosentasi orang miskin masing-masing mencapai 6,1%, 6,0% dan 5,9%, artinya tidak ada perubahan yang signifikan selama 10 tahun ini.

Tabel 5**Pendapatan Perkapitan dan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Gowa****Periode: 2005 – 2011**

Tahun	Pendapatan Per Kapita dengan harga konstan (Rp)	Pendapatan Per Kapita dengan harga berlaku (Rp)	Jumlah penduduk miskin (jiwa)
2005	2.381.679	3.693.650	23.295
2006	1.453.592	2.457.655	19.931
2007	2.596.751	4.802.864	19.931
2008	2.723.864	5.732.787	19.931
2009	2.886.942	6.981.294	39.306
2010	2.897.361	7.790.901	39.306
2011	3.043.579	8.993.574	39.306
2012	3.211.799	10.128.896	39.306

Sumber: Kantor BPSN Jakarta

Apabila kita kita berupaya untuk menilai secara objektif dengan melakukan “*updating*” data pada 3 tahun terakhir dengan mengasumsikan kenaikan rata-rata 21,8% (harga berlaku dan mengabaikan faktor inflasi), maka Pendapatan Per Kapita pada tahun 2015 terlihat sebagai berikut :

Tabel 6

**Proyeksi Pendapatan per Kapita Kabupaten Gowa (dengan harga berlaku)
Periode 2013-2015 dengan rata-rata keanikan 21,8 %**

Tahun	Pendapatan per Kapita (Rupiah)-Harga Berlaku	Pendapatan per Kapita (\$) dengan kurs berlaku
2013	12.336.995	
2014	15.026.460	
2015	18.302.229	1.525

Dengan demikian Pendapatan per Kapita Kabupaten Gowa bisa mencapai Rp.18.302.229 dan bila dikonversi ke dalam USA Dollar dengan memakai kurs sekarang pada level normal yaitu Rp.12.000 per 1 \$., maka pada tahun 2015 ini telah dicapai pada level \$. 1.525. **Berarti Gowa berada di kelas “*Lower Middle Income*”, sekelas dengan Ethopia dan Afganistan, bukan lagi “*Lower Income*”.**

Menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa yang akan datang untuk mempertahankan minimal pertumbuhan 21,8% dengan memperhitungkan harga yang berlaku, tetapi bila memperhitungkan tingkat inflasi rata-rata 10% ,maka minimal yang harus dicapai 11,8% agar posisi kelas “*Lower Midle Income*” dapat dipertahankan. Bahkan perlu lompat kelas berada pada “*Upper Middle Income*” yang memang kelasnya Indonesia sekarang ini.

Memang banyak faktor variabel yang menentukan tinggi rendahnya pendapatan per kapita tersebut diantaranya adalah faktor pertumbuhan penduduk dan posisi kekuatan mata uang Rupiah terhadap USA Dollar, selain dari peningkatan penghasilan bruto daerah yang ditentukan dari hasil produksi dan jasa setiap tahunnya.

2.4.5. Sektor Potensial Kabupaten Gowa

Untuk melihat sektor potensial yang harus dijaga dan dikembangkan, maka kita perlu melihat struktur dari Pendapatan Regional Bruto Kabupaten Gowa dan pertumbuhan jumlah penduduknya karena kedua faktor ini menentukan tingkat Pendapatan per Kapita.

Tabel 7

Pendapatan Domestik Regional Bruto Daerah Th.2011 (Harga Konstan)

Sektor	Rupiah (juta)	%	Keterangan
Pertanian	886.253	44,15	Sektor utama, sudah jenuh
Pertambangan	14.408	0,72	
Industri Pengolahan	77.721	3,87	Sektor berkembang
Listrik dan Air Bersih	20.179	1,01	
Bangunan	67.302	3,35	Sektor berkembang
Perdagangan, Hotel dan Restoran	300.487	14,97	Sektor berkembang
Angkutan/Komunikasi	149.712	7,46	Sektor berkembang
Bank, Keuangan dan	173.513	8,64	Sektor berkembang

Perumahan			
Jasa	317.701	15,83	Sektor berkembang
TOTAL	2.007.277	100	
Laju Pertumbuhan		6	

Pada Tabel 7 di atas menunjukkan bahwa sektor pertanian masih merupakan tumpuan utama pendapatan masyarakat Gowa, kamingnya sektor ini selama 3 tahun terakhir tidak tumbuh, bahkan cenderung menurun.

Sektor yang diharapkan berkembang adalah sektor industri pengolahan, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor angkutan/komunikasi, sektor bank, keuangan dan perumahan serta sektor jasa. Belum ada *recording* sektor pariwisata yang sangat berpotensi untuk dikembangkan.

Pemerintah Kabupaten Gowa 5 tahun ke depan harus berkonsentarsi untuk semakin meningkatkan sektor pertanian dan 6 sektor lainnya yang sedang berkembang dengan mencapai laju pertumbuhan antara 6-12% serta sektor pariwisata yang belum mendapat penanganan sama sekali untuk mempertahankan kelas Pendapatan per Kapita "*Lower Middle Income*" bahkan untuk naik kelas ke "*Upper Middle Income*" sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa Indonesia memang telah berada di kelas ini, meskipun beberapa provinsi dan kabupaten masih tertinggal.

Faktor lain yang perlu dijaga adalah pertumbuhan jumlah penduduk yang pada tahun 2012 mengalami pertumbuhan 1.02% dari tahun sebelumnya. Tingkat pertumbuhan ini perlu dipertahankan agar jumlah penduduk yang

membagi 'kue PDRB' Kabupaten Gowa tidak yang menyebabkan Pendapatan per Kapita justru merosot. Bahkan signal lampu kuning ditunjukkan pada perkembangan jumlah penduduk miskin mungkin bertambah, sekalipun tidak ada catatan yang jelas dari BPS.

BAB III

VISI DAN MISI 5 TAHUN KE DEPAN

Sebenarnya Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa sekarang telah menyusun Visi dan Misinya untuk jangka panjang (2005-2025) yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk menjadi panduannya dalam menjalankan peranan dan kebijaksanaannya dari tahun ke tahun menyusun dan menjalankan APBDnya. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk selama 20 tahun (2005-2025) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) daerah untuk setiap 5 tahunnya.

Setiap pemimpin atau Bupati dan Wakil Bupati baru yang terpilih secara demokratis berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) daerah untuk setiap 5 tahunnya.

RPJM yang baru, paling tidak untuk masa 5 tahun ke depan di bawah pimpinannya. Pedoman untuk menyusun RPJM tentu RPJP dan RPJM Nasional dan Provinsi menjadi bahan acuan dan tidak bertentangan satu dengan lainnya, tetapi seorang Bupati/Wakil Bupati baru dapat saja membawa gagasan baru dalam RPJMnya karena adanya penemuan gagasan baru, juga karena terdapat kondisi baru yang senantiasa bisa berubah dari masa ke masa, khususnya di bidang ekonomi dan tentunya memerlukan prioritas baru sesuai dengan kondisi yang berubah tersebut, tanpa mengabaikan unsur sustainability bagi hal-hal yang masih relevan dan perlu dipertahankan dari RPJM sebelumnya.

Pada kesempatan ini, kami mengajukan **Visi** dan **Misi** sebagai **calon Bupati** dan **Wakil Bupati** yang bilamana terpilih kelak akan melakukan hal-hal yang

terpola dari suatu frame berupa Visi dan Misi sebagai **janji politik** tentang apa yang akan kami lakukan nanti paling tidak selama 5 tahun ke depan dimana kami yang memegang kendali pemerintahan di daerah ini dan akan menuangkannya dalam RPJM nanti berdasarkan kondisi sekarang dan hasil analisa potensi dan permasalahannya.

3.1. VISI

Visi adalah suatu cita-cita luhur yang normatif dan ingin dicapai. Visi kami adalah sebagai berikut:

“Kabupaten Gowa sebagai wilayah otonom, membangun wilayahnya dengan semangat kebersamaan masyarakatnya untuk mencapai masyarakat “badlatun tayyibatun wa rabbun gafur” yang bermartabat dan sejajar dengan masyarakat yang maju lainnya sebagai perwujudan kejayaan baru di abad 20 ini”

Pernyataan dengan kalimat pendek dari VISI tersebut mengandung arti yang sangat luas sesuai 5 (lima) potongan kalimatnya sebagai berikut:

- a. **“Kabupaten Gowa sebagai wilayah otonom”**, untuk mengingatkan pemerintah dan masyarakatnya bahwa status daerah telah ditetapkan sebagai wilayah otonom. Kabupaten Gowa masuk dalam klasifikasi wilayah kabupaten yang otonom karena usulan dari pemerintah dan masyarakatnya sendiri dan sanggup memenuhi persyaratan sebagai daerah otonom, termasuk memenuhi ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Otonomi Daerah.

Terlepas dari kemungkinan perubahan Undang-Undang Otonomi Daerah yang akhir-akhir ini timbul pro dan kontra untuk mengurangi atau membatasi kewenangan Pemerintah Daerah dalam kaitannya untuk menghindari pertentangan dan tumpang tindih peraturan atau kebijaksanaan Pemerintah Provinsi dan Pusat, status “otonomi” adalah sebagai “motivasi” atau “etos kerja” kemandirian bekerja membangun wilayahnya sendiri.

Pemerintah dan masyarakatnya berusaha mengelolah seluruh potensi yang dimilikinya, seperti wilayah yang luas untuk pengembangan pertanian, peternakan, perkebunan, industri, properti dan lain-lainnya.

Demikian pula potensi yang ditimbulkan karena letak geografisnya dan topografisnya yang memungkinkan untuk pengembangan pertanian, perkebunan, pariwisata, perdagangan hasil produksi dan jasa dan lain-lainnya.

Mengoptimalkan potensi sumber manusianya untuk menghasilkan bisnis kreatif di bidang jasa, kerajinan tangan, konsultan, dan lain-lainnya.

- b. “membangun wilayahnya dengan semangat kebersamaan masyarakatnya “** artinya seluruh penduduk Kabupaten Gowa harus menanamkan rasa kebersamaan, karena dengan kebersamaan tersebut, maka SDMnya akan bekerja sungguh-sungguh,

mengerahkan seluruh potensi yang dimilikinya untuk pembangunan wilayahnya.

Semua *stakeholder* merasa diikutkan dalam pengambilan keputusan yang penting dan setiap keputusan akan mengedepankan atau memprioritaskan kepentingan orang banyak dan masyarakat ekonomi lemah. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul.

Menjunjung tinggi persaudaraan tetapi saling memahami perbedaan, menghilangkan rasa persaingan dengan saling memhatikan.

Pemimpinnya dan pelaksana pemerintahan memberikan contoh, tidak otoriter dan memelihara premanisme untuk memberangus lawan politiknya atau yang melawan kebijakannya. Tidak bermental feodal dan menumbuhkan semangat demokratis. Melayani masyarakat bukan dilayani oleh masyarakat. Tidak buta tuli dari jeritan rakyatnya.

c. “mencapai masyarakat “badlatun tayyibatun wa rabbun gafur”

Masyarakat “**badlatun tayyibatun wa rabbun gafur**” adalah keadaan masyarakat yang sangat ideal, diharapkan dan dicita-citakan. Mungkin ini adalah sebagai tujuan yang dapat dicapai melalui masa yang panjang lebih dari 5 tahun yang harus kita taruh jauh kedepan sebagai cita-cita luhur.

Keadaan masyarakat yang hidup dalam **keseimbangan**. Sejahtera dan berkeadilan, sejahtera lahir dan batin, sehat jasmani dan rohani. Tidak mengejar hanya urusan dunia semata, tetapi juga mempersiapkan kehidupan akhiratnya.

Pemimpin yang mengayomi rakyatnya dan rakyat mencintai pemimpinnya, tidak anarkis dalam menyampaikan protes tetapi patuh menjalankan peraturan karena aturannya tidak melukai perasaannya dan untuk kepentingan masyarakat sendiri, bukan kepentingan sang pemimpin atau pejabatnya.

d. “yang bermartabat dan sejajar dengan masyarakat yang maju lainnya” adalah tujuan selanjutnya yang ingin dicapai oleh Kabupaten Gowa yakni berusaha untuk mensejajarkan diri dengan daerah maju di Sulawesi Selatan sebagai tujuan jangka menengah (5 tahun ke depan).

Indikator yang digunakan untuk menjadi sejajar dengan daerah maju di Sulawesi Selatan adalah tingkat pendapatan perkapita masyarakat, kalau pada tahun 2012, posisi Kabupaten Gowa pada ranking 18 atau pada kategori papan tengah, maka setelah melewati 5 tahun ke depan, harus naik ranking, masuk pada jajaran papan antara ranking 5-10.

Diharapkan pembangunan ekonomi tercapai secara berkeadilan dan tidak ada lagi kecemburuan antara masyarakat dataran tinggi

terhadap dataran rendah atau sebaliknya. Semuanya menjadi bangga sebagai pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Gowa.

Pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan, menaikkan produksi tanpa merusak lingkungan, bahkan harus ikut bertanggung jawab terhadap pemeliharaan lingkungan “*go green*”. Menjaga kesetaraan gender, menekan jumlah orang miskin, membantu renovasi rumah yang tak layak dihuni, menjaga kesehatan ibu dan anak, tidak ada yang kekurangan gizi. Lahirnya atau munculnya SDM yang berprestasi, baik di bidang keilmuan, teknologi, dan olahraga.

Semua harapan di atas memungkinkan terjadi karena kita memperoleh sumber keuangan yang dapat memenuhi keperluan kita untuk mewujudkan cita-cita itu. Sumber keuangan yang ditopang oleh peningkatan pendapatan per kapita, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (APBD), penghematan, ada perencanaan yang mempunyai prioritas, partisipasi masyarakat, pengusaha dan pembukaan usaha baru, lapangan kerja baru, dan kreatifitas dari pemerintah dan masyarakat sebagai pelaku bisnis itu sendiri. Kembali ke kalimat di atas, asaz kebersamaan dapat meringankan beban berat untuk mewujudkan cita-cita bersama dan struktur ekonomi yang berimbang, kemandirian dalam pembiayaan pembangunan, kemampuan pengelolaan potensi daerah, pembangunan yang berwawasan lingkungan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang meningkat, Indeks Pembangunan Gender (IPG), yang progresif, stabilitas politik yang demokratis dan keamanan yang stabil serta penghargaan terhadap Hak asasi Manusia (HAM).

e. **“sebagai perwujudan kejayaan baru di abad 20 ini”**

Bilamana cita-cita jangka menengah dan jangka panjang tercapai seperti diuraikan di atas, maka tidak mustahil Kabupaten Gowa menjadi pusat peradaban orang-orang Gowa yang bermartabat dan bermakna dalam hidup ditengah masyarakat Sulawesi Selatan, Indonesia, bahkan dunia.

Budaya lama yang menjadi kebanggaan orang-orang Gowa di abad XVI sampai XVIII yang berlandaskan “siri’ dan pace” akan bangkit kembali di abad XX ini sebagai suatu **“HARAPAN BARU”**.

3.2. MISI

Misi adalah garis-garis besar usaha atau perjuangan yang akan diupayakan untuk mewujudkan visi yang telah dicanangkan di atas. Misi tidak boleh menyimpang atau bertolak belakang dengan visi tadi.

Misi yang kami kemukakan disini terdiri dari 8 pokok yang akan dituangkan pelaksanaannya melalui “Program” yang akan dibahas pada Bab berikutnya. Adapun 8 Misi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Misi Pertama

Menegakkan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance*) yang ditunjang oleh keberadaan aparat pemerintah yang memiliki kompetensi dan etos kerja yang tinggi dan tidak kolusif, koruptif dan nepotism (kkn).

Penegakan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance*) merupakan misi pertama yang secepat mungkin harus diwujudkan, tidak perlu menunggu lama, karena adanya pengalaman dan pengetahuan manajerial dan sistem yang dapat digunakan untuk merealisasikan misi ini.

Bilamana misi ini berhasil, maka misi berikut lainnya mudah dicapai karena para manajer pelaksana yang menduduki jabatan birokrat, yang menjalankan program dari misi-misi tersebut.

Untuk mencapai **pemerintah yang baik dan bersih (*good governance*)** diperlukan faktor-faktor pendukung sebagai berikut:

- a. **Partisipatif (*participation*)**, mendorong masyarakat untuk menggunakan haknya mengemukakan pendapat dalam proses penyusunan kebijakan secara langsung atau tidak langsung.
- b. **Penegakan Hukum (*law enforcement*)**, menjamin bahwa penegakan hukum berlangsung secara adil dan tidak diskriminatif.
- c. **Keterbukaan (*transparency*)**, penyelenggaraan pemerintahan harus memberikan informasi yang memadai pada masyarakat dan mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai informasi yang dibutuhkan.
- d. **Responsif (*responsiveness*)**, penyelenggara pemerintahan memberikan respon yang cepat terhadap proses, permasalahan dan keinginan masyarakat.
- e. **Kesetaraan (*equality*)**, memberikan kesempatan yang sama pada semua warga masyarakat tanpa pengecualian untuk meningkatkan kesejahteraannya.
- f. **Visi yang strategis (*strategic vision*)**, memformulasikan strategi pembangunan daerah yang ditunjang dengan sistem penganggaran

yang memadai, mencukupi, yang meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab dari seluruh warga masyarakat untuk meningkatkan kemajuan daerah.

- g. **Efektivitas dan Efisien (*effectiveness and efficiency*)**, memberikan pelayanan untuk memnuhi kebutuhan public dengan memanfaatkan sumber daya untuk pencapaian sasaran kerja secara optimal, efisien dan bertanggung jawab.
- h. **Profesionalisme (*professionalism*)**, memiliki kemampuan dan ketrampilan penyelenggaraan pemerintahan, yang pada gilirannya memberikan layanan yang mudah didapat, cepat, teliti dan terjangkau.
- i. **Akuntabilitas (*accountability*)**, memperkuat pertanggungjawaban penyelenggara pemerintahan pada publik.
- j. **Pengawasan (*supervision*)**, menerapkan control dan pengawasan yang ketat terhadap administrasi publik dan kegiatan pembangunan dengan melibatkan masyarakat.

Misi Kedua

Melakukan penataan “Tata Ruang dan Wilayah” atau merevisi yang sudah ada dengan mempertimbangkan faktor kebutuhan dan ketersediaan ruang, menghindari tumpang tindih, benturan kepentingan, skala prioritas pembangunan dan kelestarian potensi alam dan lingkungan.

Setiap pemerintah daerah telah menyusun dan menetapkan tata ruang wilayahnya, tetapi tidak sedikit pula yang melanggar aturan yang telah ditetapkan karena adanya tekanan kepentingan atau karena kelemahan dan kekurangan pada saat menyusun tata ruang atau wilayah itu sendiri.

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pengaturan tata ruang adalah kebutuhan pemakaian ruang seperti untuk pemukiman dan seluruh sarana yang diperlukan bagi suatu pemukiman, untuk kawasan industri, areal pertanian, perkebunan, pertambangan dan lain-lainnya. Setiap permintaan pemakaian tata ruang harus diarahkan dan ditempatkan sesuai pembagian yang telah ditentukan agar tidak tumpang tindih, tidak terjadi benturan kepentingan, kesemrawutan dan bisa menjaga kelestarian potensi alam dan lingkungan.

Misi Ketiga

Membangun ekonomi daerah yang didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- **Pemanfaatan potensi alam tanpa merusak lingkungan**
- **Melakukan pengembangan dan fokus pada sektor yang potensial dan berakselerasi luas, seperti pada sektor pertanian dan pariwisata.**
- **Mendorong pertumbuhan dan pengembangan usaha kecil dan menengah.**
- **Penyerapan tenaga kerja lokal secara optimal**

Membangun ekonomi Kabupaten Gowa dengan memanfaatkan potensi alam seperti lahan yang luas untuk sektor pertanian. Keindahan panorama alam dataran tinggi untuk sektor pariwisata, kandungan dalam tanah yang menghasilkan barang tambang. Semuanya dikelola dengan menjaga kelestarian lingkungan agar semua usaha ini dapat berlangsung lama dan terjaga kesinambungannya.

Pemilihan jenis komoditi pertanian yang bisa dikelola oleh para pelaku ekonomi secara luas, mudah, mempunyai pasar dan bernilai ekonomis tinggi. Demikian pula jenis pariwisata yang bisa mengundang kedatangan turis baik dari manca negara maupun lokal. Semuanya diharapkan bisa menciptakan kegiatan ekonomi yang menyebabkan peningkatan penghasilan masyarakat.

Usaha kecil dan menengah adalah kekuatan ekonomi yang sangat signifikan untuk membawa kemajuan atau peningkatan pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, perlu mendapat perhatian dan pembinaan. Pengusaha ekonomi kecil dan menengah umumnya lemah dalam permodalan, rendahnya pengetahuan dan pengalaman manajemen, terbatasnya informasi teknologi dan pasar harus diatasi secepatnya dengan melibatkan institusi pemerintah melalui program-programnya yang selaras dengan tujuan yang mau dicapai, perbankan, perusahaan menengah ke atas dan perusahaan daerah sebagai mitra yang saling membutuhkan dan menghidupi. Perlu dibangun sentra-sentra kegiatan di daerah-daerah dengan spesifikasi produk andalannya sehingga memudahkan penyuluhan dan sekaligus akses pemasarannya dengan menyediakan fasilitas atau sarana yang diperlukan seperti pasar, bank, koperasi dan lain-lainnya.

Penyerapan tenaga kerja lokal tentu menjadi perhatian pemerintah daerah sehingga jumlah pengangguran dapat ditekan, Disini pemerintah daerah harus terjun memberikan pendidikan dan pelatihan agar tenaga kerja yang tersedia “siap pakai” dan terlatih sehingga selain dapat memenuhi kebutuhan usaha, juga dapat menghasilkan produk yang berkualitas yang pada gilirannya menjadi produk andalan daerah.

Misi Keempat

Memenuhi kebutuhan infrastruktur (jalan, jembatan, pengairan persawahan, sumber air minum), sumber energi dan sarana telekomunikasi, sekolah untuk pendidikan anak-anak, puskesmas yang paling dekat dari masyarakat untuk mendapatkan pertolongan penyembuhan dari penyakit yang diderita dan menjaga gizi yang baik yang berkeadilan dan merata, baik di dataran tinggi maupun rendah sehingga tidak menimbulkan kecemburuan satu dengan lainnya.

Membangun infrastruktur berupa jalan dan jembatan untuk lalu lintas darat yang mempermudah dan memperlancar transportasi untuk melancarkan arus komoditi dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hayatnya dengan mudah dan murah.

Pembangunan infrastruktur ini harus diutamakan pada pencapaian sentra-sentra ekonomi, kepadatan penduduknya serta objek-objek pariwisata.

Pembangunan irigasi untuk memperluas cakupan suplai air pada area persawahan yang masih tadah hujan, sehingga pada gilirannya diharapkan hasil produksi pertanian khususnya padi dan jagung semakin meningkat. Demikian pula penyediaan fasilitas pompa dan pipa untuk suplai air minum dan keperluan keluarga setiap hari pada daerah pegunungan atau yang gersang dan kurang sumber airnya

Pembangunan sekolah mulai dari tingkat dasar (SD) sampai menengah atas (SMU) pada setiap wilayah yang sangat dan sudah membutuhkannya. Bukan hanya fisik gedungnya tetapi juga ketersediaan guru-guru yang berkualifikasi

(*qualified*) menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi dan terpenuhi kesejahteraan hidupnya.

Penyediaan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang ditingkatkan pelayanannya sampai ketersediaan fasilitas rawat inap secara terbatas di setiap Ibukota Kecamatan. Bukan hanya berfungsi untuk pengobatan dan perawatan tetapi mempunyai program penyuluhan dan pengawasan penyakit menular dan kekurangan gizi serta menekan angka kematian Ibu dan bayi.

Semua keperluan di atas disediakan secara adil dan proporsional dengan jumlah atau kepadatan penduduk, serta pertimbangan lain yang menekan perbedaan antara daerah dataran tinggi dan rendah yang biasa menimbulkan kecemburuan sosial.

Misi Kelima

Membuka pintu yang selebar-lebarnya untuk para investor, pengusaha yang bermodal besar, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang bisa merealisasi sektor usaha yang membutuhkan modal besar dan teknologi tinggi, termasuk industri pengolahan hasil pertanian yang dapat bersinergi dengan pengusaha lokal, kecil dan menengah, mengalihkan pengetahuan dan teknologinya kepada pengusaha lokal, menjadi mitra bisnis, menerobos dan memperluas jaringan pasar dan ikut menjaga kelestarian lingkungan. Serta yang tidak kalah pentingnya untuk mendorong peningkatan nilai tambah (*value added*) dari produk yang dihasilkan.

Usaha yang berskala atau bervolume besar yang memerlukan modal besar, teknologi tinggi yang mahal, perputaran modal yang lama biasanya hanya dapat dipenuhi oleh perusahaan yang besar, grup nasional dan internasional, mempunyai jaringan pemasaran yang luas. Usaha seperti ini diperlukan pada industri besar, pertanian dan perkebunan yang luas, pertambangan, pariwisata dan perhotelan, perumahan (*real estate*) dan lain-lainnya dipersilahkan masuk ke wilayah Kabupaten Gowa.

Usaha mereka ini diundang masuk, diberikan *guidance* dan asistensi, dibantu untuk mendapatkan lahan, diperkenalkan mitra lokal, bahkan bila diperlukan kehadiran Perusahaan Daerah sebagai mitra juga disiapkan dan dimudahkan perizinan yang diperlukan.

Beberapa hal yang perlu dijadikan syarat untuk menerima mereka diantaranya:

- Menyerap tenaga kerja lokal yang banyak (*intensive labor*).
- Bisa melakukan sinergi dengan perusahaan lokal, kecil dan menengah.
- Bisa mengalihkan dan menyebarkan teknologi untuk peningkatan volume dan kualitas produksi.
- Menyerap hasil produksi perusahaan kecil dan menengah atau membantu memasarkannya.

Misi Keenam

Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, baik dari segi kemampuan intelektualitas, iman dan moralitasnya.

Mempersiapkan dan membina Kualitas Sumber Daya Manusia yang mempunyai pengetahuan dan keahlian pada teknologi di suatu bidang tertentu, religius, taat dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Esa, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan toleransi atau penghormatan yang tinggi untuk antara pemeluk agama serta maupun antara sesama agama.

Kualitas Sumber Daya Manusia merupakan suatu aspek yang sangat penting karena SDM ini dipersiapkan untuk memenuhi seluruh kebutuhan tenaga kerja di bidang pertanian, perkebunan, pertambangan, pariwisata dan disektor lainnya yang memerlukan tenaga kerja yang siap untuk menjadi tenaga yang professional di bidangnya, sehingga hasil kaerjanya dapat meningkatkan daya saing produk dan jasa dari Kabupaten Gowa. Disamping itu, sebagian SDM juga dapat dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan di luar wilayah Kabupaten Gowa seperti ke Malaysia, Hongkong, Timur Tengah dan Kanada.

SDM ini perlu dipersiapkan bekal pengetahuan dasar kejuruan perbengkelan, sopir, pelayan kesehatan dan pengetahuan umum, bahasa, etika atau budi pekerti, pengetahuan manajemen, etos kerja dan lain-lainnya sehingga siap menjadi tenaga professional pada saat diperlukan. Untuk mendukung misi ini diperlukan Sekolah Kejuruan baik formal maupun non formal dilengkapi laboratorium dan peralatan praktek dan pembimbingnya.

Misi Ketujuh

Membangun dan mengembangkan nilai-nilai agama, khususnya agama Islam sebagai “rahmatan lil alamin” melalui dakwah untuk menjadikan nilai-nilai ajaran agama sebagai landasan spritual dan etika moral dalam kehidupan kemasyarakatan dan pemerintahan.

Pembangunan dan pengembangan nilai-nilai agama menjadi bahagian yang perlu mendapat perhatian untuk menciptakan keseimbangan antara jasmani dan rohani antara dunia dan akhirat, untuk mempertahankan nilai-nilai agama yang luhur yang membawa rahmat ke dunia ini dari terjangan dan pengikisan budaya asing, kehidupan modern yang biasanya tidak disadari menjauhkan kita dari ajaran agama.

Penyebaran dan pemeliharaan nilai-nilai agama melalui dakwah, ajakan dan ajaran yang lembut, persuasif, tanpa kekerasan dan paksaan, menimbulkan kesadaran dari diri sendiri untuk berhubungan dengan sesama manusia dengan baik dan menjaga ibadah untuk memelihara hubungan dengan Allah SWT dengan intens yang akhirnya, diharapkan Allah memberikan hidayah dan taufiknya kepada masyarakat Gowa .

Kita harus meyakini bahwa terkadang kita menerima musibah dan cobaan bahkan hukuman karena kita lalai, sudah terjerumus oleh pengaruh setan, karena kita salah sendiri. Misalnya tertimpa bencana longsor, banjir dan lain-lain karena kita merusak alam, egois dan rakus, lupa bahwa Allah meminta kita jauh dari sifat tersebut.

Memakmurkan tempat ibadah karena tempat ibadah adalah salah satu sarana untuk menyampaikan dakwah yang bukan hanya terkait dengan masalah ibadah ritual, tetapi juga untuk pemahaman ajaran agama tentang bagaimana hidup ditengah masyarakat dengan baik, toleransi terhadap orang lain yang berlainan agama dan mengikuti petunjuk dan peraturan pemerintah.

Misi Kedelapan

Memelihara keamanan dan penegakan hukum (*law enforcement*) dan Hak Asasi Manusia (HAM) serta demokrasi untuk mencapai keadilan yang bermartabat.

Pemeliharaan stabilitas keamanan menjadi penting terutama untuk menjaga kepercayaan para investor dari luar, serta perlindungan kemandirian masyarakat, perselisihan diredam dengan penyelesaian kekeluargaan, jalan terakhir melalui jalur hukum, dimana masyarakat akan diperlakukan adil, tidak saling mengintimidasi, tidak bertindak represif secara berlebihan yang melanggar hak asasi manusia (HAM).

Memelihara HAM dan demokrasi merupakan tuntutan peradaban sekarang. Pada misi ini menekankan usaha-usaha untuk membangun masyarakat masyarakat sosial yang terhindar dari tindakan kekerasan karena adanya kepastian hukum, tercipta rasa keamanan jiwa dan harta baik milik perseorangan maupun badan sebagai bagian yang terpenting dalam HAM.

Begitupula di alam demokrasi, Organisasi Politik dan Massa serta LSM adalah sebagai wadah pengkaderan bangsa untuk mempersiapkan pemimpin yang pada gilirannya memegang kepemimpinan daerah bahkan nasional perlu ditumbuhkan, partisipasi dan komunikasi dalam menyalurkan pendapatnya jangan disumbat, penghormatan atas setiap perbedaan sehingga tercapai keadilan dan harmonisasi kehidupan sosial.

Misi Kesembilan

Membangun sarana dan kegiatan untuk para generasi muda yang produktif, edukatif untuk mempersiapkan kader pelanjut pembangunan.

Pemuda atau remaja merupakan komponen masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Jumlah populasinya yang besar dan semangatnya yang tinggi harus tersalurkan dan terarahkan kepada aspek yang produktif dan edukatif sebagai upaya untuk pembentukan kader penerus pembangunan.

Menghindari pengaruh narkoba, minuman keras, pergaulan bebas dan kenakalan remaja dengan menyalurkan aktivitas mereka pada kegiatan extra kurikuler di sekolah seperti PRAMUKA, Remaja Masjid, kegiatan olah raga, kesenian dan bela diri.

Diharapkan pada gilirannya mampu berprestasi yang bisa mengangkat dan meningkatkan reputasi daerah.

Misi Kesepuluh

Mengakselerasi dan mengeksplorasi seluruh sumber-sumber keuangan yang halal dan tayyiban subagai sumber pembiayaan pembangunan dan menjaga efektivitas dan efesiensi terhadap penggunaannya.

Keuangan adalah ibarat darah dalam tubuh kita, kurang darah menjadikan tubuh kita lemas dan tidak berenergi. Oleh sebab itu Pemerintah harus mampu mengolah seluruh sumber keuangan yang bisa dimiliki, baik melalui APBN, PAD, Program pemerintah pusat NON APBN, hibah dan bantuan luar negeri, partisipasi pengusaha dan masyarakat.

Partisipasi masyarakat juga menjadi potensi yang perlu mendapat perhatian, baik meliputi dari kesadaran membayar zakat dan infak melalui badan amil zakat daerah maupun sumbangan sukarela.

Pada sisi lain, pemerintah harus menghindari pemborosan, tidak melakukan studi banding yang tidak relevan dengan upaya pencapaian target program yang sedang dijalankan dan kegiatan-kegiatan lain yang merupakan pemborosan saja.

Demikian pula upaya penyederhanaan birokrasi harus dilakukan dan tidak menambah anggaran pembelanjaan rutin, tetapi lebih mengarah pada belanja investasi untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Misi ini akan dituang dalam suatu Rencana Aksi Perbaikan Sumber Penerimaan Daerah (*Revenue Improvement Action Plans-RIAPs*).

Misi Kesebelas

Meningkatkan Pendapatan Perkapita sampai tingkat minimal "*Lower Middle Income*" pada tingkat pendapatan per kapita rata-rata \$1.500 dan mengurangi jumlah penduduk miskin pada tingkat 10.000 jiwa.

Misi ini merupakan bagian terakhir yang ingin dicapai sekaligus parameter keberhasilan pembangunan oleh kami, Insyaallah. Seluruh program, khususnya yang terkait dengan sektor ekonomi diarahkan untuk pencapaian misi ini.

BAB IV

KEBIJAKAN DAN PROGRAM UTAMA

Berbagai kebijakan dan program yang akan dijalankan, meneruskan kebijakan dan program yang sedang berjalan dan mendukung pencapaian Visi dan Misi yang telah diuraikan di muka dan mungkin akan muncul gagasan baru setelah mendalami permasalahan dan potensi yang dimiliki serta menghentikan yang berlawanan atau bertentangan dengan usaha pencapaian Visi dan Misi 5 tahun kedepan.

Pada kesempatan ini kami akan mengemukakan beberapa program utama yang akan kami jalankan sebagai berikut :

A. Bidang Birokrasi dan Pelayanan Masyarakat:

1. Reorganisasi pemerintah daerah, baik struktural dan fungsional, maupun personilnya untuk mencapai "*good governance*", utamanya untuk efektivitas dan efisiensi birokrasi serta kecepatan melayani masyarakat dan memuaskan.
2. Revaluasi Tata Ruang dan Wilayah untuk melakukan penyesuaian penggunaan tata ruang yang tepat sesuai misi yang telah dicanangkan.
3. Menata "**Sungguminasa**" sebagai ibukota kabupaten menjadi Ibukota yang nyaman, bersih, tidak semrawut dan menjadi kebanggaan masyarakat Gowa.

4. Menciptakan sistem rekrutment, promosi, mutasi dan penalti bagi birokrat secara transparan, kompetisi yang sehat, tidak KKN, ada *reward* dan *punishment* yang dilakukan secara jujur dan terukur.
5. Membangun kompleks perumahan dinas Anggota DPRD dan para eksekutif, setingkat Kepala Dinas, sehingga pada gilirannya diharapkan dapat bekerja secara optimal atas pembangunan daerahnya, Kabupaten Gowa.
6. Membangun kerjasama dan melakukan kordinasi dengan pihak Komite Pemberantasan Korupsi, Pihak Kejaksaan, Polisi dan Badan Pemeriksa Keuangan untuk menciptakan sistim pengawasan yang "*built up*", "*waskat*" sebagai usaha preventif atas pemberantasan korupsi.
7. Membatasi kegiatan yang bersifat pemborosan keuangan daerah, seperti studi banding tanpa sasaran yang jelas manfaatnya dan tidak menjadi bagian prioritas.

B. Bidang Sosial; Pendidikan, Kesehatan, Pemuda dan Olah raga, Agama, dan lainnya:

8. Membentuk Sekolah Unggulan pada setiap kecamatan untuk tingkat Sekolah Dasar dan membangun gedung sekolah baru pada desa yang sudah saatnya membutuhkan kehadiran sarana pendidikan SD di desanya dan membentuk 1 unit SMP dan 1 unit SMA unggulan pada setiap 3 wilayah Kecamatan.
9. Membentuk tim untuk pembinaan dan pengawasan guru SD, SMP, SMU dan sekolah yang berada dibawah naungan Kementrian Agama dan swasta dan melakukan pemilihan guru teladan setiap tahunnya dengan

pemberian penghargaan untuk mendorong peningkatan kualitas para guru.

10. Memberikan beasiswa kepada murid, pelajar/siswa, mahasiswa yang berprestasi baik prestasi akademiknya, maupun prestasi lainnya yang perlu mendapat penghargaan karena mengharumkan nama Kabupaten Gowa. Dievaluasi setiap tahun dan ditentukan anggarannya setiap tahun
11. Menghapuskan sistem pengawasan guru sekolah SD,SMP dan SMA oleh Satuan Polisi (Satpol) Pamongpraja, tetapi melalui *“built up control system”* dari lingkungan pelaku pendidikan sendiri. Sedangkan Satpol Pamongpraja dialihkan ke bidang-bidang yang memerlukan tenaganya.
12. Membangun 1 unit Rumah Sakit yang besar di Ibukota Kabupaten atau dikecamatan yang berbatasan dengan Ibukota. Rumah Sakit yang dikelola pihak swasta.
13. **Meningkatkan pelayanan PUSKESMAS** untuk menjadi Rumah Sakit setiap Kecamatan yang bisa menerima pasien rawat inap dan membentuk Tim Kerja untuk pembinaan kesehatan dengan mengaktifkan kembali gerakan Posyandu di setiap desa untuk memantau dan mencegah kekurangan gizi dan menekan angka kematian ibu dan bayi, yang semuanya dikoordinir di PUSKESMAS.
14. Memasukkan kegiatan belajar membaca Al-Qur’an dari tingkat SD sampai SMA seluruh Kabupaten Gowa dengan system yang terorganisir baik antara Dinas Pendidikan Umum, Dinas Kementrian Agama, dan Majelis Ulama Kabupaten Gowa.
15. Membangun Tanfiz Al-Quran dengan melalui kerjasama Pemerintah Daerah dan pihak swasta yang simpatik dan peduli dengan menetapkan 4 lokasi strategis yang bisa mencakup seluruh wilayah Kabupaten Gowa.

16. Melakukan renovasi Masjid Agung Syech Yusuf sebagai kebanggaan masyarakat Gowa dan menyiapkan fasilitas kantor Majelis Ulama Kabupaten Gowa dan mengaktifkannya, termasuk penyusunan program dakwah dan kegiatan diseluruh Masjid di Kabupaten Gowa.
17. Mengaktifkan organisasi PRAMUKA sebagai sarana ekstra kurikuler untuk pembangunan phisik dan mental para pemuda dan pelajar. Demikian pula organisasi lainnya yang diselenggarakan dan dimiliki oleh remaja, pelajar, pemuda dan Mahasiswa, seperti REMAJA MASJID, Karang Taruna, sanggar seni, Klub Olah Raga dan lain-lainnya.
18. Membangun stadion mini di beberapa Kecamatan Parangloe, Tinggi Moncong dan Bajeng sebagai pusat pembinaan olah raga sepak bola di Kabupaten Gowa dan akan mengaktifkan organisasi PERSIGOWA yang bisa mengangkat nama Kabupaten Gowa.
19. Membina olah raga cabang sepak takraw, bulu tangkis, tennis dan atletik dengan membentuk organisasi, sarana yang diperlukan, termasuk pusat kegiatan dengan memilih lokasi yang tepat dan membuka beberapa event, baik untuk rekreasi maupun prestasi, termasuk penyelenggaraan "Pekan Olah Raga Kabupaten" sekali setiap 2-3 tahun.
20. Melakukan revitalisasi lapangan stadion sepak bola di Pallangga sebagai sarana olah raga yang layak. Direncanakan untuk bekerjasama dengan pihak pengusaha swasta untuk pengelolaannya yang dialihfungsikan sebagai stadion futsal terbuka.

C. Bidang Infrastruktur dan Perumahan:

21. Menata dan membangun **Danau Mawang menjadi kawasan pemukiman yang asri dan tertata baik** untuk dipersiapkan menjadi bagian dari obyek wisata yang dipaketkan wisata peninggalan sejarah Kerajaan Gowa pada abad 16-18 sebagaimana direncanakan pula pada Program 36 di bawah. Disini akan dilibatkan pihak pengusaha dan investor swasta.



Gambar 3

**Pemandangan Danau Mawang, berair pada musim hujan,
tetapi kering kerontang pada musim kemarau**

22. Menata dan membangun infrastruktur jalan disepanjang 2 sisi sungai menyesuaikan rencana Kota Maminasata.
23. Menata dan mencari solusi yang tepat atas kesemrawutan lalu lintas dari Panciro sampai Jembatan Sungguminasa karena pedagang pasar tumpah/kaget yang menggunakan bahu jalan yang menimbulkan kemacetan.

24. Membentuk Tim kerja untuk membantu masyarakat miskin dan dhuafa dengan mengangkat harkat dan martabatnya, sebagai anggota masyarakat yang produktif dan dihargai oleh semua lapisan masyarakat. Akan disediakan rumah anak yatim pada setiap kecamatan yang dibina oleh Pemerintah Daerah bekerjasama dengan LSM atau masyarakat yang peduli. Melakukan renovasi rumah yang tidak layak dihuni secara bertahap dan bergilir diseluruh desa.
25. Membangun jalanan yang berkualitas baik (beton) pada jalan-jalan utama yang banyak dilalui kendaraan dan menghubungkan sentra-sentra ekonomi.
26. Pembangunan sarana air bersih dan layak minum khususnya pada wilayah pegunungan, kering dan sering kekurangan air.
27. Pembangunan Perumahan dan Ruko yang sesuai tata ruang yang ditetapkan dengan memperhatikan desain estetika, infrastruktur yang baik, keindahan dan kenyamanan bagi penghuni dan masyarakat luas serta melakukan penghijauan pada ruang penyerapan air.

D. Bidang Ekonomi; Pertanian, Pariwisata, Keuangan dan lain-lainnya:

28. Memanfaatkan secara optimal setiap lahan kosong atau *idle* selama ini secara optimal dengan tanaman pangan dan hortikultura yang cocok dengan kondisi iklim dan jenis tanahnya. Disini direncanakan tanaman **jagung** yang bisa menghasilkan cepat sebagai tanaman pangan dan tanaman **komoditi pertanian dan perkebunan yang bernilai ekonomis dan komersil.**

29. Demikian pula di sepanjang bantaran sungai perlu ditanami (penghijauan) untuk menghindari pendangkalan sungai dan mencegah banjir dan pada gilirannya menghasilkan produksi kayu dan mempunyai nilai ekonomis. Disini perlu dilibatkan pihak swasta, investor dan Perusahaan Daerah.
30. Membuka Pelatihan Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk bidang: perbengkelan, perawat (*nurse*), sopir dan pada gilirannya akan disalurkan ke instansi atau pihak yang bisa menyalurkannya untuk mendapatkan pekerjaan baik di dalam negeri, maupun di luar negeri dan tetap melakukan monitoring dan supervisi.
31. Menata dan mengorganisir petani sayur dengan baik untuk menanam jenis sayur yang bernilai ekonomi tinggi, ada pembelinya dan dapat memberikan penghasilan yang layak dengan membentuk sentra pada 2 wilayah yakni Tinggi Moncong dan Tombolopao sebagai Sentra pertama dan Tompobulu dan sekitarnya di Sentra kedua. Setiap sentra dilengkapi infrastruktur dan penunjangnya.
32. Membangun **Pusat Pembibitan Produk Pertanian** khususnya padi, jagung untuk mendukung usaha swasembada pangan nasional. Juga untuk pengembangan tanaman hortikultura yang bernilai ekonomis tinggi dan bimbingan penggunaan teknologi pertanian yang tepat.
33. Membangun **sarana wisata dan pemanfaatan waduk Bili-bili**, khususnya untuk budi daya ikan tawar dan pada gilirannya dapat memberikan hasil yang menambah pendapatan masyarakat dan pemerintah daerah. Disini dilibatkan Perusahaan Daerah atau pengusaha swasta atau dengan bekerjasama antara keduanya.
34. Menata kawasan Malino dengan berbagai objek wisatanya dan wilayah sekitarnya sebagai destinasi wisata, membangun infrastruktur dan

fasilitas pendukung. Serta melakukan promosi dan membuat *event* yang berkelanjutan. Membuka kesempatan partisipasi pihak swasta untuk bisa melakukan akselerasi lebih cepat dan luas.

35. Merintis pembangunan Taman Raya Gowa, pusat seluruh jenis pohon dan bunga untuk kelas nasional bahkan dunia, seperti Kebun Raya Bogor dan Taman Bunga Cipanas. Lokasi untuk pembangunan Taman Raya ini sangat memungkinkan di lokasi antara Kecamatan Tinggi Moncong dan ParangLoe, dimana terdapat air terjun seperti Bantimurung di Maros, sebagaimana tampak pada Gambar 4 dibawah



Gambar 4

**Air Terjun di kawasan Belapunrangan-Desa Kasimburan,
Kaki Gunung Bawakaraeng, salah satu area yang cocok untuk membangun
Kebun Raya Gowa**

36. Menata dan membangun tempat-tempat wisata sejarah, mulai dari makam Sjech Yusuf, Masjid Katangka dan makam raja-raja sebagai kawasan wisata paket peninggalan sejarah pada abad 16-18 masa kejayaan kerajaan Gowa.



Gambar 5

Masjid Katangka (masjid tertua di Gowa, bahkan di Sulawesi) dan Kuburan Raja-2 Gowa, merupakan destinasi Wisata di Gowa.

37. Menata ulang eksplorasi/eksploitasi di bidang pertambangan untuk memperlakukan keadilan bagi penambang kecil bisa hidup dan berkembang. Untuk penambang yang memerlukan investasi besar, tidak mematikan usaha penambang kecil, menghindari monopoli dan saling menunjang dan menjaga kelestarian lingkungan.
38. Mendorong **pembukaan bank atau BPR pada setiap sentra ekonomi** di setiap Ibukota Kecamatan, agar para pengusaha lemah atau kecil dan menengah dapat memperoleh akses untuk fasilitas kredit yang mendukung kelancaran usahanya.

39. Menggalang sumber keuangan dari masyarakat dengan lebih mengaktifkan **badan amil zakat Kabupaten Gowa** yang di-*manage* dengan baik, profesional dan amanah.
40. Memberikan bimbingan pelatihan tenaga kerja, manajemen dan tutunan permodalan melalui efektifitas kredit perbankan ataupun koperasi, serta pemasaran khusus bagi pemilik usaha industri kecil atau *home industry* dan menengah, seperti industri batu merah dan lain-lainnya.

E. Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

41. Mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan dengan menjalain kerjasama antara pihak kepolisian, TNI dan masyarakat untuk lebih cepat mengantisipasi gangguan keamanan.
42. Menjalin hubungan yang baik melalui komonikasi dan keterbukaan dengan semua pihak (*stakeholders*) , khususnya pada instansi POLRI, TNI, DPRD, Kejaksaan, Pengadilan, Parpol dan Ormas untuk melibatkan kebersamaan dan partisipasi membangun daerah Gowa. Membuka dialog rutin dengan para mahasiswa, guru, alim ulama, LSM dan para pengusaha minimal sekali dalam 3 bulan menciptakan komunikasi dua arah secara positif untuk membangun daerah secara bersama-sama dengan seluruh *stakeholder*.
43. Memerangi narkoba dan premanisme, khususnya menjaga keterlibatan aparat birokrat pemerintah daerah terhadap bahaya narkoba dan premanisme.

44. Menumbuhkan demokratisasi dengan memperhatikan aspirasi dari masyarakat dan menjaga penegakan hukum.

BAB V

PENUTUP

Adapun kesimpulan dari seluruh uraian kami, ialah sebagai berikut:

5.1. Visi, Misi dan Program yang diajukan disini adalah merupakan janji politik yang diajukan oleh Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Gowa pada PILKADA yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2015 atau awal 2016 nanti.

5.2. Visi, Misi dan Program ini diajukan untuk menjadi pedoman pelaksanaan pemerintahan, termasuk pada saat menyusun rencana kerja yang dituangkan dalam APBD setiap tahunnya bila calon Bupati, Drs.H.Sjachrir Sjafruddin Daeng Jarung dan calon Wakil Bupati, Ir.H. Anwar Usman, terpilih dan/atau memenangkan PILKADA nanti.

5.3. Visi, Misi dan Program ini dibatasi oleh waktu, hanya selama 5 tahun kedepan tapi bersifat *sustainable* (berkelanjutan) bilamana ingin diteruskan pada periode berikutnya, juga dibatasi oleh kemampuan keuangan daerah dan SDMnya.

5.4. Ada 44 rencana kebijakan dan program prioritas yang diuraikan disini tidak semuanya merupakan hal baru, mungkin ada diantaranya sudah berjalan, tetap dipertahankan sepanjang memang mendukung pencapaian misi selama 5 tahun kedepan.

5.5. Banyak program lain yang sudah dijalankan utamanya terkait dengan program pemerintah pusat dan propinsi tidak dibahas disini seperti “kartu sehat” dan “kartu pintar” yang sudah seharusnya dijalankan dan tidak perlu lagi dibahas disini

5.6. Keberhasilan pembangunan menurut kami adalah tercapainya pendapatan perkapita pada tingkat yang layak untuk menjaga harkat dan martabat masyarakat Gowa. Peningkatan pendapatan perkapita secara maksimal diupayakan mencapai tingkat yang wajar. Oleh sebab itu, pemerintah harus berupaya sungguh-sungguh untuk mencapai peningkatan pendapatan ini agar tidak berada pada level “*lower middle income*”. Untuk peningkatan pendapatan perkapita secara optimal untuk 5 tahun ke depan, ditargetkan untuk mengangkat Gowa dari kelas bawah menjadi kelas menengah di Sulawesi Selatan pada ranking antara 10-15 dari seluruh Kabupaten/Kota, yang hanya dapat dicapai dengan kerja keras dan kerjasama pada semua *stakeholder* dan seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Gowa.

5.7. Keterbatasan sumber keuangan, mengharuskan kita untuk menyusun skala prioritas dan mengurangi belanja rutin serta mencegah kebocoran akibat korupsi dan manipulasi penggunaan keuangan. Sejalan dengan itu diperlukan suatu Rencana Aksi Perbaikan Sumber Penerimaan Daerah (*Revenue Improvement Action Plans-RIAPs*). Kontribusi dan peranan sektor swasta diharapkan mengambil posisi strategis untuk memenuhi kebutuhan modal besar untuk membuka usaha pertanian, pariwisata, dan industri. Kami bertekad untuk mengembalikan kebijaksanaan pembangunan ekonomi pada

titik yang benar, sehingga laju pertumbuhan ekonomi bisa mengejar ketertinggalan selama ini.

5.8. Semoga Visi, Misi dan Program yang diuraikan ini bermanfaat dan dapat menjadi “masukan” bagi siapapun yang terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati pada periode yang akan datang.